

## **BAB I**

### **PENDAHULAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Untuk memperoleh kesejahteraan dan pembangunan yang merata pemerintah Indonesia membagi beberapa wilayah di Indonesia sebagai Provinsi yang dipimpin oleh gubernur agar efisien dan efektif penyelenggaraan dari pemerintah pusat ke daerah dan menyerahkan wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing, oleh karena itu pemerintah daerah atau gubernur yang lebih mengetahui potensi daerahnya dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh potensi di daerahnya.

Indonesia pada tahun 2017 memiliki 35 Provinsi dan setiap gubernur mengepalai beberapa kecamatan di daerah yang dipimpin oleh bupati atau yang mengepalai tiap-tiap kecamatan, serta camat yang mengepalai beberapa desa di daerahnya, agar mempermudah dalam proses pembangunan dan kesejahteraan serta pengalokasian dana.

Banyaknya daerah serta desa-desa di Indonesia diharapkan dapat memajukan tiap-tiap daerah dan desa dengan lebih efektif dan efisien, akan tetapi pada penerapannya masih banyak desa yang mengalami kesulitan untuk mengolah setiap potensi di tiap-tiap desa yang ada di Indonesia, hal tersebut mengakibatkan banyak desa dengan potensi yang dapat diolah menjadi penghasilan desa menjadi terabaikan, hal tersebut sangat disayangkan karena dengan mengolah potensi yang

ada di desa selain dapat menambah penghasilan daerah pemerintah juga dapat mengikis angka pengangguran yang khususnya di desa-desa.

Kurangnya lapangan pekerjaan di desa membuat angka pengangguran di desa menjadi meningkat dan pada akhirnya beberapa dari mereka lebih memilih untuk pergi merantau ke kota kota besar untuk mencari nafkah dan tak sedikit dari mereka yang karna ketatnya persaingan dalam mencari kerja menjadi pengangguran di kota besar.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan wewenang agar tiap-tiap desa di Indonesia dapat mengolah potensinya sendiri yang sudah dimula sejak lama melalui beberapa perogram. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil di karnakan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah campur tangan pemerintah terlalu banyak, yang mengakibatkan masyarakat desa sedikit kusulitan dalam berinovasi dan kreatifitas, hal ini mengakibatkan usaha desa dalam mengelola potensi desa menjadi terbatas dan dengan besarnya capur tangan pemerintah mengakibatkan desa sulit untuk mandiri.

Karena dirasa kurang efektif pemerintah memerikan pendekatan dengan mendirikan lembaga ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh desa yang tidak dibatasi oleh intruksi pemerintah namun berdasarkan keinginan masyarakat dengan melihat potensi yaang ada, hal ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 2004 pemerintah menurunkan UU No. 32 pada pasal 213 ayat (1) tentang pemerintah daerah di sebutakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan

usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Tujuan di bentuknya lembaga ekonomi desa adalah untuk menjebatani penguatan ekonomi di pedesaan. Setelah itu tercantum pada peraturan pemerintah (PP) no. 71 tahun 2005 tentang desa pendirian badan usaha dukungan kebijakan daerah kabupaten atau kota dengan cara memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari para pemodal besar di karenakan badan usaha milik desa merupakan lembaga yang baru sehingga memerlukan landasan yang kuat untuk berkembang

Operasional lembaga ekonomi desa yang di sebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan” (Ahmad Sofyan, *Landasan Hukum Pendirian badan Usaha Milik Desa*, <http://www.keuangandes.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/> Akses 20 Juli 2018).

Pada tahun 2014 BUMdes dapat mendapatkan modal yang besar secara langsung dari kekayaan desa yang di pisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014. Tentang desa. “Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.”(Ahmad Sofyan, *Landasan Hukum Pendirian badan Usaha Milik Desa*, <http://www.keuandangdesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/> Akses 20 Juli 2018).

Pada tahun 2015 landasan hukum tentang BUMDes semakin di perjelas dengan Permendesa No.4 tahun 2015, sebelum keluarnya permendesa No.4 tahun 2015 pemerintah sudah mengeluarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang kurang rinci dalam pembangunan desa, oleh karena itu pada Permendesa No.4 tahun 2015 di buat agar dapat lebih memperjelas mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan, jenis usaha yang akan didirikan, pelaporan dan pertanggung jawaban laporan. Dengan adanya Permendesa No.04 tahun 2015 ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan dalam BUMDes yang benar.

Namun demikian dalam proses pelaksanaannya masih banyak desa yang kurang mampu atau sulit untuk mendirikan dan mengelola BUMDes di deanya

masing masing. Kebanyakan BUMDes di Indonesia mendirikan BUMDes di bidang simpan pinjam dan sebagai contoh masalah yang di hadap oleh BUMDes yang mendrikan usaha di bidang simpan pinjam adalah “BUMDes “Sukamaju.” Kecamatan Kubutambahan jumlah kredit yang bermasalah di BUMDes tahun 2016 adalah sebesar RP. 189.000.000. Namun, keredit yang sudah tersalurkan tersebut tidak sebanding dengan tingkat pengembalian dari asabah bahkan tidak membayar buga beserta pokok pinjaman dalam kurun waktu yang sangat lama,”(Luh Yeni Wulantari, 2017: Vol.8 No.2) Dan contoh permasalahan lainnya seperti yang terjadi di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014-2015 “ Desa Pematang Tebih , Badan Usaha Milik Desa belum cukup memadai yang mana Bdan Usaha Milik Desa belum mampu untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa sebagai basis ekonomi milik warga desa. Badan Usaha Milik Dessa Tebih Mandiri sampai saat sekarnag hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam.”(Welli Indra Mayu, 2016: page3)

Permasalahan lain untuk BUMDes yang tidak bergerak di bidang simpan pinjam sebagai contohnya adalah seperti yang terjadi di Desa Tambak kerjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pada tahun 2017 “Dalam Pengoprasiannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Deesa) terkendala oleh modal. Melihat kondisi Desa yang selama ii sangat minim anggaran di tambah dengan penduduk dessa yang sering menunggak pembayaran jasa air PAM (PAMSIMAS), sehingga yang terjadi peputaran dana berhenti dan tidak kembali secara perputaran yang di inginkan.’(Dikky Damara, dkk, 2017: 3) Dan masaah BUMDes lainnya terjadi di

Desa Cokro kembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. “Desa Cokrokembang masih mengalami beberapa kendala di dalam pemberdayaan BUMDes, di antaranya masih kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes.”(Dinda Rahmadanik, 2016; 909). Ada juga permasalahan BUMDes yang belum mampu mengembalikan pemasukan kas desa kepada PADes seperti yang terjadi di desa Ngringinrejo, “sejak tahun 2011 BUMDes ini belum memberikan kontribusi kepada PADes, padahal, tujuan dari pelaksanaan BUMDes adalah mampu meningkatkan pendapatan Desa.” (Puguh Budiono, 2015: 118)

Beberapa contoh permasalahan ada beberapa Desa yang sudah cukup baik dalam mengelola BUMDes dan telah mendapatkan penghasilan serta prestasi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai acuan atau contoh untuk desa lainnya dalam membangun BUMDes sebagai contoh BUMDes Karangandri Sejahtera di desa Karangandri, Kesughan, Cilacap, BUMDes Karangandi memanfaatkan jarak yang dekat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menjadi supplier segala kebutuhan untuk berjalannya PLTU dan berdasarkan data tahun 2016 BUMDes ini telah meraih omzet sebesar 7 miliar. Contoh lainnya adalah BUMDes Tirtonirmolo yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan kini telah mencapai omzet Rp. 8,7 miliar.

Banyaknya kendala dan prestasi sebuah BUMDes sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor negatif maupun positif, sesuai dengan faktor di atas maka penulis atau peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul Faktor Faktor

Yaang Mempengaruhi Kinerja Badan Usaha Miliik Desa (BUMDes) pada Tahun 2018 (studi Kasus Di Desa Tirtonimolo dan panggunharjo)

Badan Usaha Milik Desa Tirtonirmolo yang bergerak dibidang simpan pinjam, dengan nama Unit Simpan Pinjam (USP) “Sedaya Makmur.” Telah berdiri sejak tahun 1998 hingga sekarang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tirtonirmolo pada tahun 2016 jumlah UED Sedaya Makmur telah mencapai 1.900 orang 10% ingga 15% nya adalah pemilik usaha warung, sembako dan kelontong. BUMDes ini telah mampu mngelola Aset hingga 11 miliar.

Mentri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Mendes PDDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan di tahun 2016 ada 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes yang memiliki omzet terbesar dari seluruh desa yang di indonesia (Lidya Julita Sembiring, *Ini BUMDes Beromzet Terbesar Di Indonesia*, <http://economy.okezone.com/read/2017/04/09/320/1662912/ini-bumdes-beromzet-terbesar-di-indonesia> di akses pada 20 agustus 2018) dan BUMDes tirto Nirmolo Mendapatkan Peringkat kedua dengan omzet Rp8,7 Miliar.

Selanjutnya adalah BUMDes panggunharjoyang berdiri pada bulan maret 2013 dan di beri nama BUMDes Panggung Lestari, BUMDes Panggung Lestari Memanfaatkan dan mengelola sampah dengan membuat Rumah Pengelolaan Sampah (RPS), selain dalam pengelolaan sampah BUMDes panggung lestari juga memiliki inovasi lainnya yaitu, produksi tanaman oil, desa wisata Matarman, dan pengelolaan minyak goreng bekas atau minyak goreng bekas, BUMDes ini sudah

jadi percontohan dan rujukan dari desa-desa lainnya untuk membangun BUMDes lainnya.

#### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat rumusan permasalahannya yaitu:

- B1. Bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Panggunharjo dan Wonokromo)?
- B2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di desa Panggunharjo dab Wonokromo di tahun 2018?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- C1. Menjelaskan kinerja BUMDes di Panggunharjo dan Wonokromo
- C2. Menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes di panggunharjo dan Wonokromo

#### **D. Manfaat Peneltian**

- D1. Bagi ilmu pemerinthana manfaat peneitian ini dalah sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang BUMDes, sebagai ilmu dan menambah pengetahuan tentang faktor faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes.
- D2. Bagi BUMDES dan pemerintah desa, penelitian ini manfaatnya adalah dapat dijadiak sebagai acuan dalam mengambil keputusan dalam perospemangunan BUMDes, serta sebagai pedoman untuk membuat

kinerja lebih baik dengan faktor faktor yang terdapat di dalam penelitian ini.

### E. Tinjauan Pustaka

setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan yang peneliti lakukan. Dan penelitian tersebut adalah:

**Tabel 1.1**

#### **Tinjauan Pustaka**

No	Nama	Judul	Keterkaitan Penelitian/Review
1	Ni Luh Yeni Wulantari, anantawikrama Tungga Atmadja, NI Luh Gede Erni Sulindawati	Efektivitas Sistem Pengadilan Internal Melalui Sanksi Adat Pada BUMDesDi Desa Sukamaju Kubutambahan Kecamatan Buleleng DalamUpayaMengatasi Kredit Bermasalah	Terdapat masalah bumdes yaitu kredit macet yang disebabkan oleh masyarakat salah beranggapan dengan menganggsap bahwa dana BUMDes adalah bantuan dari pemerintah sehingga tiddak perlu dikembalikan dan faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah

			<p>kurangnya tenaga kerja yang di sebabkan oleh keterbatasan dana apabila merekrut pegawai baru. Dan pegawai belum sepenuhnya paham tentang pengkreditan. Sedangkan faktor alam, dikarnakan para debitur sebagian besar adaah buruh harian di proyek petni. Dan tidak memperoleh pendapatan ketika musim hujan tiba sehingga membuat mereka tidak mampu untuk melakukan pembayaran untuk kredit pinjaman.</p>
2	Welli Indra Mayu	<p>Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu</p>	<p>BUMDes tidak mampu mengelola potensi desa yang ada dan memanfaatkan perusahaan yang ada di sekitarnya untuk menjalin kerjasama</p>

		Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015	sehingga dapat meminta bantuan, desa pematang tebih dengan potensi yang ada hanya membangun sebuah BUMDes yang bergerak di bidang simpan pinjam. Sulitnya berkembangnya BUMDes ini di sebabkan pemerintah desa yang tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengolah lahan perkebunan milik desa, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia untuk pengelola, kepemimpinan, menejerial dan tatakelola tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3	Yeni Fajarwati	Impelmentasi Perogram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa	Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah,

		Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang 2016	kurangnya bantuan financial dan non financial, serta tanggapan masyarakat yang masih awam terhadap BUMDes membuat dampakdibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan untuk pemberdayaan masyarakat dan BUMDes tidak terlalu Berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat
4	Rosyidatul ilmiyah dan indah prabawati	Impelmentasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Sejahera Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Siduarjo	BUMDes Surya Sejahtera memiliki dua Badan Usaha yang bergersak dlam bidang simpan pinjam dan dalam bidang perdagangan sembako, yang memiliki kendala rendahnya karakter pengelola toko sembako dan rendahnya respon masyarakat
5	Agus Nuruisyam	Pengaruh Pendirian	Penelitian ini membahas

	Suparman dan Glang Yuniar Rahman	Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di desa Waringisari Kecamatan Langensai kota Banjar.	tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui BUMDes masih kurang dengan masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesulitan membuka usaha, kesulitan mengembangkan usaha yang di jalankannya.
6	Robin Gita Mandira, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan	Analisis Sistem Pengadilan Intern Pemerian Kredit Pada Badan Usha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha Di Desa Tajun.	Dalam penelitian ini menjelaskan seberapa besar dampak dan manajemen dari Pengadilan Intern terhadap Badan Usaha Milik Desa di Desa Tajun yang bergerak pada bidang Simpan Pinjam. Penagadialan Intern diterapkan untuk menghindari kredit macet penyimpangan atau untuk menjamin pengemalian

			kredit oleh peminjam.
7	Komang Arya Wicaksana	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji, Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng	BUMDes Karya Bakti Pertiwi yang bergerak di usaha simpan pinjam memiliki kendala kredit macet, penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang terjadi di BUMDes Karya Bakti Pertiwi, yang salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan kredit, kegagalan usaha debitur, lemahnya lembaga pengawasan kredit, debitur yang meninggal dunia, dan debitur yang pindah alamat
8	Fitria Sabilla	Sisialisasi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Oleh Pemerintah Desa Ponggok, Klaten Dengan	Untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di desa Ponggok membuat sebuah inovasi yang sesuai dengan

		<p>Pendekatan Teori Disfusi Inovasi</p>	<p>sumberdaya alam yang terdapat di desa tersebut. Inovasi dapat terwujud dari komunikasi yang dibangun oleh anggota masyarakat dengan cara membagikan ide inovasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima inovasi tersebut dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan usaha BUMDes. Penelitian ini membahas tentang proses sosialisasi inovasi BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.</p>
9	<p>Pieter Perdana, T, Ahmad Rifai, Didi Murwadi</p>	<p>Analisi Kinerja Sosial Dan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) usaha Ekonomi</p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang kinerja BUMDes di desa ngaso mandiri yang ternyata tidak mampu</p>

		Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngaso mandiri Desa Ngaso kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.	menjangkau semua usaha yang di sebabkan karna faktor masyarkat yang banyak memiliki mata pencharian ganda, dan jumlah peminjam masih minim, dan masih di perlukan peran aktif dari UED-Sp untuk memberikan informasi untuk meningkatkan kreaifitas masyarakat.
10	Singgih Tri Atmojo	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tumerejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi).	Badan Usaha Milik Desa Al-Madina memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai impelmentasi peran BUMDEs untuk upaya meningkatkan pendapatan ekonomi anggota BUMDes sehinga dapat terciptanya kesejahteraan, penelitian ini membahas tentang peranan

			(pemberian modal usaha) BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa pemmurejo.
11	Ratna Azis Prasetyo	Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bonjonegoro.	Penelitian inilebih memfokukskan kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa penjambon, dengan cara gotong royong (partisipasi masyarakat) dan pemanfaatan dana BUMDes, peran BUMDes di Desa Pejambon sudah sangat baik, di karnakan adanya huungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membangu,mengelola BUMDes.dan sebagian besar masyarakat desa sudah mengetahui peranan dan kegunaan BUMDes.

12	Dinda Ramadanik	Peran BUMDES Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	Berdasarkan hasil dari penelitian BUMDes di Desa Cokrokembang masih berjalan pada satu bidang usaha yaitu simpan pinjam. Terdapat potensi yang dapat dikembangkan melihat beragamnya usaha yang ada di Desa Cokrokembang, namun yang menjadi kendala pelaku usaha masih belum memahami keuntungan menjadi anggota BUMDes sehingga mereka memilih memasarkan usahanya secara mandiri. Selain itu yang menjadi kelemahan dari BUMDes Cokrokembang yaitu sumber daya manusia yang kurang
----	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			memadai dan kurangnya kesadaran pengurus tentang menjaga dan mengembangkan BUMDes Cokrokembang.(Dinda Ramadanik,2014: hal 192)
13	Gede Nugrah Adi Gunaya, Edy Sujana, Putu Eka.DMD	Fenomena Rangkap Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Tinggasari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)	Penelitian ini membahas tentang pengaruh fenomena rangkap jabatan yang pada umumnya dapat berpengaruh buruk dikenakan dapat mengganggu kinerja dalam pengelolaan BUMDes akan tetapi justru berdampak baik terhadap BUMDes di Desa Tinggasari, adanya rangkap jabatan Pada BUMDes ini di karenakan Kualitas SDM Di Desa tersebut kurang baik.
14	Dikky Damara,	Mekanisme Alokasi Dana	Penelitian ini membahas

	Eko Sabar.P, Ratna Hermawati	Desa Di Desa Tambakrejo Kecamatan Petambon Kabupaten Kendal Dalam Rangka Pemberdayaan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa)	tentang mekanisme alokasi dana untuk badan usaha milik desa dan bentuk operasional BUMDes di desa tambakrejo
15	Arif Wahyudi, Fepna Rustiana.	Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDes Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar)	Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan tanggung renteng, dengan di terapkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah. Pembiayaan tanggung renteng ini memiliki sistem pembayaran, jika terdapat salah satu anggota yang tidak membayar kewajiban angsuran, maka seluruh anggotalah yang harus membayar kewajiban yang belum terbayarkan.

Beberapa penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan yang peneliti lakukan, yaitu penelitian tentang BUMDes, yang membedakannya adalah objek dan tempat yang akan diteliti, penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes dengan studi kasus pada 2 Desa yaitu Desa Panggungharjo dan Argorejo, dengan adanya perbedaan tersebut oleh karena itu peneliti tertarik menjadikan “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja BUMDes Pada Tahun 2018 (studi kasus Desa Panggungharjo Kec. Sewon dan Wonokromo Kec. Pleret).” sebagai judul dan tema penelitian

## **F. Kerangka Teoritik**

### **F.1. BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yang terdapat pada sebuah buku yang di buat oleh departemen pendidikan nasional pada tahun 2007

(Departement Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: hal 4) yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pernyataan modal (saham atau andil);
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijelaskan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Dalam pengelolaannya BUMDes memiliki beberapa prinsip umum, dan beberapa prinsip umum untuk mengelola BUMDes tersebut adalah:

1. Pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif yaitu harus melakukan kerjasama yang baik, emansipatif, secara sukarela atau memberikan kontribusi untuk

kaujuan BUMDes. Transparansi, semua komponen harus di ketahui oleh segenap lapisan masyarakat yang mengelola. akuntabel, dapat di pertanggung jawabkan secara teknis dan administratif dan suitable usaha harus dapat di kembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang di jalankan secara profesional dan mandiri, serta memerlukan informasi akurat dan tepat ter,asuk ciri khas lokal peluang dan barang maupun jasa yang di hasilkan

2. BUMDes sebagai badan usaha yang di bangun atas pemikiran maupun ide dari masyarakat desda
3. BUMDes di bangun untuk memajukan perekonomian dan memberikan pelayanan terhadap Desa
4. BUMDes harus mempertimbangkan potensi ekonomi untuk mlibatkan pihak ketiga yang akan berdampak pada masyarakat desa.

Dalam sebuah website resmi bumdesmenjelaskan tugas pokok dan wewenang dari ketua pelaksana oprasional, sekertaris dan bendahara dan manajer oprasional (*syncore, Kewajiban, Peran, dan Wewenang Pelaksana Oprasional Bumdes*<http://bumdes.id/2017/10kewajiban-peran-tugas-dan-wewenang-pelaksanaoprasional bumdes/> di akses pada 24 2018) yang akan di jelaskan dalam tabel berikut:

## **F.2. Kinerja**

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategicplanning* suatu organisasi.(Mahsun dalam Lukmanul Hakim dkk, 2016 : hal 74)

Kinerja Merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan seterategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi pada ekonomi (Amstrong dan Baron dalam Wibowo 2011: hal8).

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan seterategi (*sterategic Planing*) suatu organisasi. Secara umum, knerja merupakan prestasi yang di capai oleh organisasi dalam periode tertentu. (Muhammad Kurniawan, 2013: 5)

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu seterategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Muhammad Kurniawan, 2013:5)

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang di capai dengan setandar, rencana, atau target dengan nggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. (Aparatur Negara Nomor: per/09/M.PAN/5/2007)

Madriasmu (2004) menyebutkan ada tiga maksud di lakukannya pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **F.3. Faktor**

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah organisasi publik yang bergerak di bidang usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mensejahterakan masyarakat desa terutama di bidang perekonomian Dengan demikian maka pengertian faktor disini adalah hal yang menyebabkan atau mempengaruhi kinerja pada BUMDes.

Peran pemimpin yang mampu menciptakan ide-ide inovatif serta berkomitmen guna menumbuhkan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas serta dapat menciptakan kualitas ekonomi yang baik sesuai yang di harapkan (Furqon,2018:110)

Peran BUMDes adalah selain memperkuat PADes, juga upaya mendorong peningkatan masyarakat yang dapat di tempuh dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan cara memberi nilai tambah produk masyarakat, dalam mengembangkan kemampuan SDM sehingga

mampu memberikan nilai tambah pengelolaan aset ekonomi desa, menintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.(Furqon,2018:117)

Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Keberhasilan program pembangunan di pedesaan yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan dalam hal ini jika dikaitkan dengan BUMDes artinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hingga pelaksanaan BUMDes. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan BUMDes. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan dukungan masyarakat dalam menciptakan pembangunan.(Morni Kasila, 2018:44)

Potensi sosial budaya dari semangat kegotongroyongan dan paguyuban harus menjadi landasan dalam setiap program BUMDes. Kegotongroyongan hanya bisa tumbuh dari asas kekeluargaan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur agama dan semangat pedesaan yang selaa ini tertanam di setiap warga masyarakat desa ( Hidayat, 2016:80)

Dari beberapa teori di atas dengan beberapa jurnal yang telah penulis baca sebagai tinjauan pustaka maka faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BUMDes adalah, kepemimpinan, sumberdaya manusia, komunikasi, dan partisipasi masyarakat

### **F3.1. kepemimpinan**

Kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. (DuBrin, 2005:3)

Jika kepemimpinan manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka Badan Usaha Milik Desa dengan cepat akan mati suri, Surhayanto Hastowinoyo (Welli Indra Mayu, 2016: page 5)

### **F3.2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang di singkat SDM yang menjelaskan bahwa sumberdaya manusia sebagai “sumber” kekuatan manusia yang dapat didayagunakan untuk kepentingan organisasi mencapai sebuah tujuan organisasi(Meldona dalam Dr. Hj. Mardiyah, M.Ag Dkk: hal 12).

Suberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas kebijakan sangat tergantung pada sumberdaya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.(Riandi, 2014: hal 21).

### **F3.3. Komunikasi**

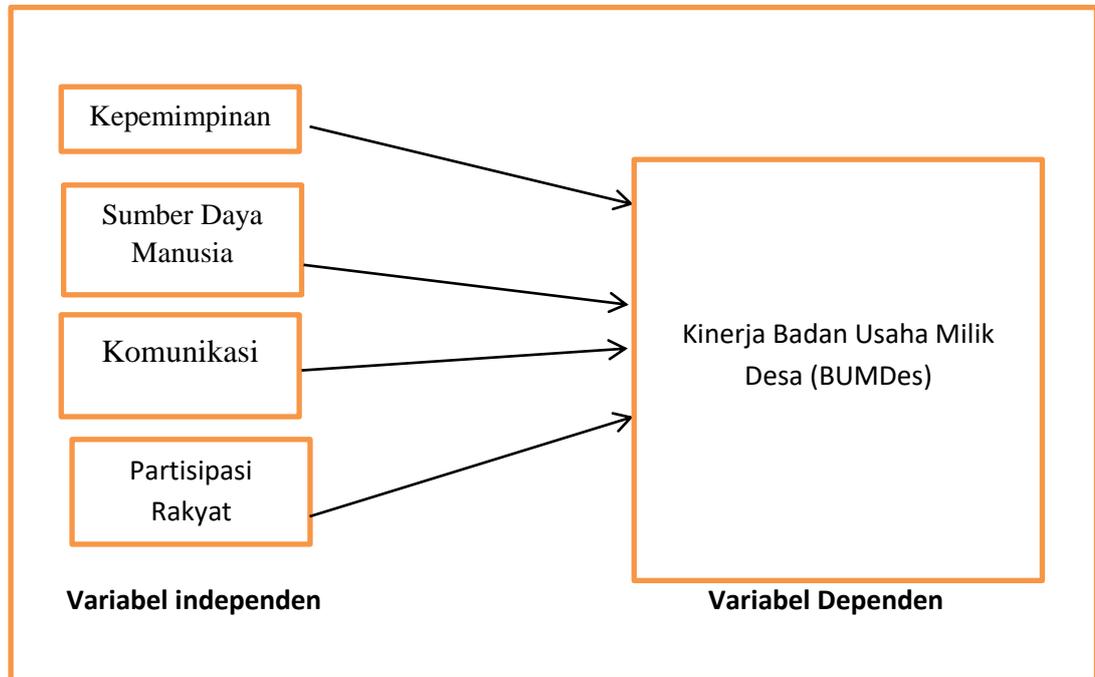
Komunikasi merupakan proses yang dipergunakan manusia untuk mencari kesamaan arti ewat transisi dengan pesan simbolik, kumunikasi merupakan saluran untuk mengorganisasikan memimpin, dan mengendalikan, sehingga wajar untuk di simpulkan bahwsas salah satu kekuatan yang menghambat kinerja krja kelompok atau organisasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif.(Gibson dalam Harni Ningsih, 2016:)

Sosialisasi merupakan suatu perwujudan dari komunikasi dan dalam pelaksanaanya sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarkat terkait dengan inovasi baru (Fitria Salbila2018:hal7)

### **F3.5. Partisipasi Masyarakat**

Tidak adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, berpengaruh terhadap daya tahan dan berkelanjutan Badan Usaha Milik Desa seperti tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat tumbuh dan berkembanya badan usaha.(Welli Indra Mayu, 2016: page 6)

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teoritik**



1. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes
2. Sumber Daya Manusia memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes
3. Sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes
4. Partisipasi Rakyat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMDes

## **G. Definisi konseptual**

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep istilah konsep tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan istilah tersebut bersidat *konstitutif* (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak pihak dan telah di bakukan stidaknya dikamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak (Hidayat dalam Inu Dhamar Jati,2014: hal 42)

1. Badan Usaha Milik Desa adalah (BUMDes) adalah lembaga usaha yang berujuan untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan pembangunan untuk masyarakat desa dengan cara mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk kemanfaatan Desa dan masyarakat dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
2. Kinerja BUMDes mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/ program /kebijakan dalam mewujukan sasaran
3. Faktor-daktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bumdes untuk tercapainya keinginan BUMDes.

## **H. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah mendefinisikan variabel secara oprasional berdasarrkan karakteristik yang di amati ketika melakukan pengukuran secara

cermat terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas (Hidayat dalam Inu Dhamar Jati: 2014: hal 49)

**Tabel 1.2**  
**Definisi Oprasional**

	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>A</b>	<b>Kinerja BUMDes</b>	1.Tingkat pencapaian sasaran BUMDes	Tingkat pencapaian BUMDes dalam mewujudkan visi dan misi BUMdes
		2.Pelaksanaan kegiatan atau program	Pelaksanaan kegiatan atau program BUMDes untuk mewujudkan visi dan misi BUMDes.
<b>B</b>	<b>Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja</b>	1.Kepemimpinan	Kemampuan ketua BUMDes dalam manajemen dan membuat perencanaan.
		2.Sumberdaya manusia	Kemampuan pegawai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab
		3.Komunikasi	a.hubungan antara BUMDes dengan Pemdes b.Hubungan antara BUMDes dengan Masyarakat c.Transparansi dan penyuluhan tentang program BUMDes
		4.Partisipasi Rakyat	Kerjasama, gotongroyong dan keikutsertaan masyarakat dengan BUMDes

- a. Kinerja BUMDes
  - 1. Tingkat pencapaian sasaran BUMDes
    - a. Tingkat tercapainya Visi dan Misi BUMDes.
  - 2. Pelaksanaan kegiatan atau program
    - a. pelaksanaan kegiatan atau program untuk dalam mewujudkan Visi dan Misi.
- b. Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja
  - 1. Kepemimpinan
    - a. Kemampuan ketua BUMDes dalam membuat perencanaan dan manajemen organisasi.
  - 2. Sumberdaya manusia
    - a. Kemampuan peagawai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab
  - 3. Sosialisasi
    - a. Huungan antara BUMDes dengan Pemerintah Desa
    - b. Hubungan antara BUMDes dengan masyarakat
    - c. Transparansi dan penyuluhan tentang program BUMDes
  - 4. Partisipasi Rakyat
    - a. Kerjasama dan gotong royong masyarakat dengan BUMDes

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat di amati oleh orang yang di teliti (Tailor Dan Bogdan, 1984:5)

Deskriptif adalah suatu metode dalam mneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Di sebut kualitatif karena sifat data yang di kumpulkan bercorak kualitatif dan tidak meggunakan alat pengukuran (Inu Dhamar Jati, 2014:52)

## **2. Unit Analisis Data**

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Panggunharjo dan Wonokromo, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa Panggunharjo dan Wonokromo
2. Pemerintahan Desa Panggunharjo dan Wonokromo
3. Masyarakat Desa Panggunharjo dan Wonokromo

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data yang langsung dari permasalahan penelitian.data primer dalam permasalahan ini adalah data yang terkait dengan Faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan di peroleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari kajian dan sumber yang sebagai penunjang dalam analisa yang berkaitan dengan penelitian, yang di dapat dari studi pustaka, dokumen, jurnal, literature dan artikel.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab, dialog dan diskusi dengan sumber informasi. Wawancara akan dilakukan dengan sifat terbuka dan tidak berstruktur ketat, dan dilakukan secara langsung dalam menanyakan pertanyaan terhadap sumber informasi.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pemimpin atau pengelola BUMDes dan beberapa staff tentang kinerja BUMDes dan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja di BUMDes.

**Tabel 1.2**

**Sumber Wawancara**

<b>No</b>	<b>Sumber Informasi</b>
<b>1</b>	Pimpinan Pengelola BUMDes
<b>2</b>	Kepala Desa
<b>3</b>	Beberapa Staff BUMDes

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen berupa buku, jurnal dan literatur yang

berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen dan arsip yang di dapat dari lembaga yang akan di teliti akan di pelajari dan dikaji dan disusun sehingga dapat memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **5. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data akan di lakukan dalam 3 tahap yaitu:

### **1. Pengmpulan Data**

Data yang sudah di dapat akan di seleksi dan di sederhanakan agar dapat digunakan sepraktis dan se efisien mungkin sehingga hanya data yang di perlukan dan valid yang akan di gunakan sebagai sumber penelitian penulis akan mewawancarai Sumber informasi yang sudah di tentukan

### **2. Penyajian Data**

Sekumpulan data yang sudah valid hasil wawancara yang sudah tersusun yang akan di pakai untuk melakukan penilaian dan penarikan kesimpulan. Data yang telah di kumpulkan akan di simpulkan dengan menggunakan analisis yang menghasilkan analisis deskriptif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah disusun dan sudah valid yang diperoleh dari lapangan akan di simpulkan secara logis, kritis dan apa adanya.